

## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI/ KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, penelitian yang berjudul **“Pengaruh Inflasi, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Hutang Luar Negeri dan Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Triwulan I-Triwulan IV) Tahun 2011-2018 Perspektif Ekonomi Islam”**, belum ada yang mengkajinya. Akan tetapi ada beberapa jurnal/tesis yang hampir mirip dengan penelitian yang dilakukan dan dijadikan sebagai acuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Metode	Hasil
1	Lutfiana Fiqry Ichvani dan Hadi Susana (2019), <b>Pengaruh Korupsi, Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN 5.</b> <sup>1</sup>	Regresi Data Panel.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Negara ASEAN.

<sup>1</sup> Lutfiana Fiqry Ichvani dan Hadi Susana, “Pengaruh Korupsi, Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN 5, Jurnal *REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, Vol. 4, No. 1, (Tahun 2019), hlm. 61-72.

2	Dedi Junaedi (2018), Hubungan Antara Utang Luar Negeri dengan Perekonomian dan Kemiskinan: Komparasi Antarezim Pemerintahan. <sup>2</sup>	Regresi Linier Berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa utang luar negeri memiliki korelasi terhadap pertumbuhan ekonomi.
3	Irene Sarah Larasati dan Sri Sulasmiyati (2018), Pengaruh Inflasi, Ekspor, dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Studi pada Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand). <sup>3</sup>	Regresi Data Panel.	Hasil penelitian ini menunjukkan variabel inflasi, ekspor, dan tenaga kerja terbukti berpengaruh secara langsung dan simultan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
4	Jamel Boukhatem dan Fatma Ben Moussa (2018), The Effect of Islamic Banks on GDP Growth: Some Evidence From	Regresi Data Panel.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian pinjaman oleh perbankan syariah merangsang peningkatan pada pertumbuhan ekonomi di

<sup>2</sup> Dedi Junaedi, "Hubungan Utang Luar Negeri dengan Perekonomian dan Kemiskinan: Komparasi Antarezim Pemerintahan", *Simposium Nasional Keuangan Negara*, (Tahun 2018), hlm. 563-587.

<sup>3</sup> Irene Sarah Larasati dan Sri Sulasmiyati, "Irene Sarah Larasati dan Sri Sulasmiyati (2018), Pengaruh Inflasi, Ekspor, dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Studi pada Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 63, No. 1, (Oktober 2018), hlm. 8-16.

	Selected MENA Countries. <sup>4</sup>		negara-negara MENA.
5	Muhammad Dandy Kartarineka Putra dan Sulasmiyati (2018), Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Studi pada Bank Indonesia Periode Kuarta IV 2018-2017). <sup>5</sup>	Regresi Linier Berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan baik secara parsial maupun simultan Penanaman Modal Asing (PMS) dan Utang Luar Negeri (HLN) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
6	Nurul Fitriani (2018), Pengaruh Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DIY Tahun 2007-2015. <sup>6</sup>	Regresi Linier Berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY, dan secara simultan kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi DIY.

<sup>4</sup> Jamel Boukhatem dan Fatma Ben Moussa , “The Effect of Islamic Banks on GDP Growth: Some Evidence From Selected MENA Countries”, *Borsa Istanbul Review*, Vol. 18, No. 3, hlm. 231-247.

<sup>5</sup> Muhammad Dandy Kartarineka Putra dan Sri Sulasmiyati, “Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Studi pada Bank Indonesia Periode Kuarta IV 2018-2017)”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 58, No. 2, (Mei 2018), hlm. 155-163.

<sup>6</sup> Nurul Fitriani, “Pengaruh Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DIY Tahun 2007-2015”, *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 7, No. 1, (Tahun 2018), hlm. 42-50.

7	Prastowo (2018), Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi empiris di 13 Negara. <sup>7</sup>	Regresi Data Panel.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan syariah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
8	Prima Audia Daniel (2018), Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi.	Regresi Sederhana.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi meskipun tidak signifikan.
9	Abdul Malik dan Denny Kurnia (2017), Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. <sup>8</sup>	Regresi Linier Berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa utang luar negeri dan penanaman modal asing berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

<sup>7</sup> Prastowo, "Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi empiris di 13 Negara", *HAYULA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2018), hlm. 65-80.

<sup>8</sup> Abdul Malik dan Denny Kurnia, "Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, No. 2, (Januari 2017), hlm. 27-42.

10	Ade Ananto Terminanto dan Ali Rama (2017), Pengaruh Belanja Pemerintah dan Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Data Panel Provinsi di Indonesia. <sup>9</sup>	Regresi Data Panel.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah dan pembiayaan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
11	Herman Ardiansyah (2017), Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. <sup>10</sup>	Regresi Sederhana.	Hasil penelitian ini menunjukkan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
12	Hellen, dkk (2017), Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Serta Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kesempatan Kerja. <sup>11</sup>	Metode Analisis Jalur ( <i>Path Analysis Method</i> )	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan.

<sup>9</sup> Ade Ananto Terminanto dan Ali Rama, "Pengaruh Belanja Pemerintah dan Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Data Panel Provinsi di Indonesia", *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 10, No. 1, (Tahun 2017), hlm. 97-129.

<sup>10</sup> Herman Ardiansyah, "Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 5, No. 3, (Tahun 2017), hlm. 1-5.

<sup>11</sup> Hellen, dkk, "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Serta Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kesempatan Kerja", *INOVASI*, Vol. 13, No. 1, (Tahun 2017), hlm. 28-38.

13	James N. Maingi (2017), <i>The Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Kenya: 1963-2008</i> . <sup>12</sup>	<i>Vector Auto Regression (VAR)</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk investasi, infrastruktur fisik, pendidikan, perawatan kesehatan, pembayaran hutang publik, urusan ekonomi, administrasi umum, dan jasa, pertahanan, ketertiban umum dan keamanan nasional, serta konsumsi Pemerintah berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Kenya.
14	Merlin Anggraeni (2017), <i>Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1970-2015</i> . <sup>13</sup>	<i>Error Correction Model (ECM)</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian secara parsial dan simultan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

<sup>12</sup> James N. Maingi, "The Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Kenya: 1963-2008", *Advances in Economics and Business*, Vol. 5, No. 12, (Tahun 2017), hlm. 635-662.

<sup>13</sup> Merlin Anggraeni, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1970-2015", *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 6, No. 5, (Tahun 2017), hlm. 499-509.

15	M. Zahari MS (2017), Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. <sup>14</sup>	Regresi Linier Berganda.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.
16	Rosdiana Sijabat (2017), Do Productive Government Expenditures Affect Economic Growth? Evidence From Provincial Governments Across Indonesia. <sup>15</sup>	OLS	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai jenis pengeluaran pemerintah dalam bidang produktif menyebabkan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi.
17	Mutia Sari, dkk (2016), Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. <sup>16</sup>	Analisis Regresi Linier Berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

<sup>14</sup> M. Zahari MS, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi", *Ekonomis: Jurnal of Economics and Business*, vol. 1, No. 1, (September 2017), hlm. 180-196.

<sup>15</sup> Rosdiana Sijabat, "Do Productive Government Expenditures Affect Economic Growth? Evidence From Provincial Governments Across Indonesia", *Journal of Government & Politics*, Vol. 8, No. 1, (Februari 2017), hlm. 1-47.

<sup>16</sup> Mutia Sari, dkk, "Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 2, (November 2016), hlm. 109-115.

18	Eunike Elisabeth, dkk (2015), Pengaruh Investasi Pemerintah dan tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado (Studi pada Kota Manado Tahun 2001-2012). <sup>17</sup>	Analisis Regresi Linier Berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Manado.
19	Syaparuddin, dkk (2015), Pengaruh Hutang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Thailand, Malaysia, Philipina, Vietnam dan Burma Periode 1990-2013. <sup>18</sup>	Metode Eksplanatori.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hutang luar negeri berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 1990-2013 di negara Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Sedangkan berpengaruh positif di negara Fhipina dan Myanmar.
20	Widia Astuty (2015), Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. <sup>19</sup>	Regresi Sederhana.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

<sup>17</sup> Eunika Elisabeth, dkk, "Pengaruh Investasi Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 15, No. 4, (Tahun 2015), hlm. 245-254.

<sup>18</sup> Syaparuddin, dkk, "Pengaruh Hutang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Thailand, Malaysia, Philipina, Vietnam dan Burma Periode 1990-2013", *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol. 10, No. 01, (April 2015), hlm. 206-220.

<sup>19</sup> Widia Astuty, "Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara", *the 8<sup>th</sup> International Workshop on Islamic Development*, (Juni 2015), hlm. 1-17.



Berdasarkan pada tabel Kajian Penelitian Terdahulu di atas, diketahui penelitian Lutfiana Fiqry Ichvani dan Hadi Susana (2019) mempunyai persamaan dengan penelitian peneliti pada variabel independen yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan pengeluaran pemerintah dan juga menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel yang dipengaruhi. Adapun perbedaannya, di mana penelitian pada penelitian Lutfiana dan Hadi menggunakan 4 variabel independen: korupsi, konsumsi, pengeluaran pemerintah, dan keterbukaan perdagangan. Sementara penelitian sekarang menggunakan variabel: inflasi, pengeluaran konsumsi pemerintah, hutang luar negeri, dan pembiayaan syariah. Metode penelitian yang digunakan juga berbeda, dalam penelitiannya menggunakan regresi data panel sedangkan penelitian sekarang menggunakan *Error Correction Model* (ECM).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dedi Junaedi (2018), mempunyai kesamaan dengan penelitian peneliti pada variabel independen dan dependen yang digunakan. Pada penelitiannya Dedi menggunakan utang luar negeri sebagai variabel independen dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen, begitu juga variabel yang digunakan penelitian saat ini sama. Akan tetapi perbedaannya pada variabel dependen, penelitian Dedi menambahkan dampak terhadap kemiskinan, selain itu metode yang digunakan juga regresi linier berganda.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Irene Sarah Larasati dan Sri Sulasmiyati (2018), mempunyai kesamaan dengan penelitian peneliti saat ini pada variabel independen yang dan variabel dependen yang digunakan, yaitu pada variabel independen Irene dan Sri menggunakan inflasi dan PDB untuk variabel dependen yang di mana penelitian saat ini juga menggunakan variabel yang sama. Akan tetapi perbedaannya jika penelitian Irene dan Sri menggunakan tiga variabel independen, maka penelitian saat ini menggunakan 4 variabel independen. Metode analisis yang digunakan keduanya juga berbeda, yakni Irene dan Sri menggunakan metode regresi data panel, sedangkan peneliti saat ini menggunakan *Error Correction Model* (ECM).

Adapun Jamel Boukhatem dan Fatma Ben Moussa (2018), mempunyai kesamaan dengan penelitian peneliti saat ini pada variabel dependen dan independen yang digunakan, di mana pinjaman bank syariah sebagai variabel independen dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen. Metode analisis yang digunakan Jamel dan Fatma adalah regresi data panel, sedangkan penelitian saat ini menggunakan *Error Correction Model* (ECM).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dandy Kartarineka Putra dan Sri Sulasmiyati (2018), mempunyai kesamaan dengan penelitian peneliti terkait penggunaan utang luar negeri sebagai variabel independen dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen, di mana peneliti saat ini juga menggunakan variabel tersebut. Namun Muhammad dan Sri hanya menggunakan

dua variabel independen, sedangkan peneliti saat ini menggunakan empat variabel independen dalam menilai pertumbuhan ekonomi. Metode analisis yang digunakan juga berbeda, yaitu Muhammad dan Sri menggunakan regresi linier berganda, sementara peneliti saat ini menggunakan *Error Correction Model* (ECM) sebagai metode analisisnya.

Sementara Nurul Fitriani (2018) dalam penelitian yang dilakukan mempunyai kesamaan dengan peneliti yaitu pada variabel independen dan dependen yang digunakan, karena dalam penelitiannya Nurul Fitriani juga menggunakan variabel pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Namun perbedaan keduanya pada metode analisis yang digunakan, di mana Nurul menggunakan regresi linier berganda dalam analisis datanya, sedangkan peneliti saat ini menggunakan *Error Correction Model* (ECM).

Prastowo (2018) pada penelitiannya mempunyai persamaan dengan penelitian peneliti pada penggunaan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel yang dipengaruhi dan pembiayaan syariah sebagai variabel yang mempengaruhi. Sementara perbedaan penelitian Prastowo dengan penelitian peneliti saat ini adalah pada subjek penelitian dan metode yang digunakan. Kalau Prastowo menggunakan 13 negara sebagai subjek penelitian, sedangkan peneliti saat ini menggunakan Negara Indonesia sebagai subjek penelitian. Untuk metode Prastowo menggunakan regresi data panel dan peneliti saat ini menggunakan metode *Error Correction Model* (ECM).

Penelitian oleh Prima Audia Daniel (2018) juga mempunyai kesamaan dengan penelitian peneliti pada variabel independen dan dependen, yaitu sama-sama menggunakan inflasi sebagai variabel independen dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen. Perbedaannya pada lokasi penelitian, di mana Prima menggunakan provinsi jambi subyek penelitian, sedangkan peneliti saat ini menggunakan negara Indonesia secara umum. Adapun metode penelitian yang digunakan Prastowo adalah regresi sederhana, sementara peneliti menggunakan metode *Error Correction Model* (ECM).

Kemudian penelitian oleh Abdul Malik dan Kurnia (2018), mempunyai kesamaan dengan penelitian peneliti saat ini pada penggunaan utang luar negeri sebagai variabel independen dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen, di mana penelitian saat ini juga menggunakan variabel tersebut. Akan tetapi pada penelitian Abdul dan Denny hanya menggunakan dua variabel independen, sementara peneliti saat ini menggunakan empat variabel. Di samping itu, metode analisis yang digunakan Abdul dan Denny adalah regresi linier berganda, sementara peneliti saat ini menggunakan *Error Correction Model* (ECM).

Ade Ananto Terminanto dan Ali Rama (2017) dalam penelitiannya mempunyai kesamaan dengan penelitian peneliti pada variabel independen dan dependen yang digunakan. Penelitian Ade dan Ali menggunakan belanja Pemerintah dan pembiayaan syariah sebagai variabel independen, kemudian

pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen. Pada penelitian peneliti saat ini juga menggunakan variabel yang sama, baik independen maupun dependen. Akan tetapi jika peneliti saat ini menggunakan metode *Error Correction Model* (ECM) dalam analisisnya, penelitian Ade dan Ali menggunakan metode regresi data panel.

Selanjutnya Herman Ardiansyah (2017), mempunyai persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama menggunakan inflasi sebagai variabel yang mempengaruhi dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel yang dipengaruhi. Akan tetapi penelitian Herman dengan peneliti saat ini mempunyai perbedaan pada metode analisis yang digunakan, karena Herman menggunakan regresi sederhana sedangkan penelitian saat ini menggunakan *Error Correction Model* (ECM).

Hellen, dkk (2017) mempunyai kemiripan dengan penelitian peneliti saat ini, yakni dalam variabel yang digunakan. Hellen, dkk menggunakan variabel investasi untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi. Namun bedanya adalah peneliti saat ini menggunakan empat variabel di antaranya inflasi, pengeluaran konsumsi pemerintah, hutang luar negeri, dan pembiayaan syariah. Kemudian metode analisis yang dipakai oleh Hellen, dkk adalah Metode Analisis Jalur (*Path Analysis Method*), sedangkan peneliti saat ini menggunakan *Error Correction Model* (ECM).

Dalam penelitian Merlin Anggraeni (2017) mempunyai kesamaan dengan penelitian peneliti pada variabel independen dan variabel dependen yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan pengeluaran Pemerintah sebagai variabel independen dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen. Akan tetapi metode penelitian pada penelitian Merlin menggunakan regresi linier berganda, sedangkan penelitian saat ini menggunakan *Error Correction Model* (ECM).

Penelitian M. Zahari MS (2017) mempunyai kesamaan dengan penelitian peneliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan pengeluaran pemerintah sebagai variabel yang mempengaruhi dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel yang dipengaruhi. Jika penelitian saat ini menggunakan *Error Correction Model* (ECM) sebagai metode penelitian, maka pada penelitiannya menggunakan regresi linier berganda.

Rosdiana Sijabat (2017), mempunyai persamaan dengan penelitian peneliti pada variabel independen dan variabel dependen, di mana pengeluaran pemerintah sebagai variabel independen dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen. Sementara perbedaannya pada metode analisis penelitian. Jika Rosdiana menggunakan regresi data panel, maka dalam penelitian saat ini menggunakan *Error Correction Model* (ECM) sebagai metode analisis penelitian.

Mutia Sari, dkk (2016) dalam penelitian yang dilakukan mempunyai kesamaan dengan peneliti saat ini pada variabel dependen yang digunakan yaitu sama-sama menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel yang dipengaruhi. Akan tetapi untuk variabel independen penelitian peneliti saat ini berbeda. Peneliti saat ini menggunakan inflasi, pengeluaran konsumsi pemerintah, hutang luar negeri, dan pembiayaan syariah sebagai variabel independen, sedangkan Mutia Sari, dkk menggunakan variabel investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah sebagai variabel independen. Untuk metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan metode regresi linier berganda, sedangkan peneliti saat ini menggunakan *Error Correction Model* (ECM).

Penelitian Eunike Elisabeth, dkk (2015) mempunyai kesamaan dengan penelitian peneliti saat ini pada variabel dependen yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen. Adapun pada variabel independen menggunakan variabel yang berbeda. Jika Eunike Elisabeth, dkk menggunakan investasi pemerintah dan tenaga kerja, maka peneliti saat ini menggunakan variabel inflasi, pengeluaran konsumsi pemerintah, hutang luar negeri, dan pembiayaan syariah sebagai variabel yang mempengaruhi. Untuk metode analisis yang digunakan keduanya juga berbeda, di mana Eunike menggunakan regresi linier berganda, sedangkan peneliti saat ini menggunakan *Error Correction Model* (ECM).

Adapun Syaparuddin, dkk (2015) mempunyai kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu pada variabel independen dan dependen yang digunakan. Dalam penelitian Syaparuddin, dkk menggunakan hutang luar negeri sebagai variabel independen dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitiannya yakni jika penelitian saat ini menggunakan Indonesia sebagai subjek penelitian, maka dalam penelitiannya menggunakan Indonesia, Thailand, Malaysia, Philipina, Vietnam, dan Burma sebagai subjek. Metode analisis yang digunakan juga berbeda, di mana Syaparuddin, dkk menggunakan metode eksplanatori sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode *Error Correction Model* (ECM).

Widia Astuty (2015) juga dalam penelitiannya mempunyai kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama menggunakan pembiayaan syariah sebagai variabel bebas dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat. Namun perbedaannya, pada penelitian Widia menganalisis penelitian dengan metode regresi linier berganda sedangkan penelitian saat ini menggunakan *Error Correction Model* (ECM) sebagai metode analisis.

Beberapa hasil penelitian yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kajian yang berbeda. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya bisa dilihat dari Judul Penelitian, Problem, Kerangka Teori, Metode Analisis, dan Hasil Penelitian. Pada penelitian ini menganalisis tentang Pertumbuhan Ekonomi dan faktor-faktor



yang mempengaruhi, yaitu diambil dari empat variabel penting: Inflasi, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Hutang Luar Negeri, dan Pembiayaan Syariah. Selanjutnya variabel-variabel tersebut diuji menggunakan Eviews 10 dengan metode *Error Correction Model* (ECM). Namun perbedaan yang paling mendasar dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah menjadikan teori Ekonomi Islam sebagai alat analisa terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika penelitian sebelumnya dikupas melalui sudut pandang ilmu ekonomi konvensional, penelitian peneliti memasukkan teori keIslaman sebagai pisau bedah dalam kajian penelitian saat ini.

## **B. Landasan Teori/ Kerangka teori**

### **1. Pertumbuhan Ekonomi**

Secara singkat, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan *output* per kapita. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat.<sup>20</sup>

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan

---

<sup>20</sup> Azwar, "Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia", *Kajian Ekonomi & Keuangan*, Vol. 2, No. 2, (Agustus 2016), hlm. 153.

meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Di samping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk dan pengalaman kerja, dan pendidikan menambah keterampilan mereka.<sup>21</sup>

Namun menurut teori Keynes, pertumbuhan ekonomi terbentuk dari empat faktor yang secara positif mempengaruhinya, keempat faktor tersebut adalah konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Keempat faktor tersebut kembali dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: tingkat harga, suku bunga, tingkat inflasi, *money supply*, nilai tukar, dan sebagainya. Beberapa ekonom berpendapat bahwa kecenderungan yang terus meningkat terhadap *output* perkapita saja tidak cukup, tetapi kenaikan *output* harus bersumber dari proses *intern* perekonomian tersebut. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi harus bersifat *self generating*, yang mengandung arti menghasilkan kekuatan bagi timbulnya kelanjutan pertumbuhan dalam jangka panjang (periode-periode selanjutnya).<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 11.

<sup>22</sup> Muflihul Khair dan Bahrul Ulum Rusydi, "Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri (Foreign Debt) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia", *Ecces: Economics, Social, and Development Studies*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016, hlm. 5.

Di Indonesia salah satu indikator penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pengukuran PDB menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan dua cara, yaitu berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Tahun dasar yang digunakan pemerintah Indonesia adalah tahun 2010.<sup>23</sup>

PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.<sup>24</sup>

Dalam kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik. Jika kita melihat sejarah, banyak aksioma fundamental ekonomi Barat baik Kapitalis maupun Sosialis yang terinspirasi oleh dasar-dasar Ekonomi Islam.

---

<sup>23</sup>Badan Pusat Statistik, "Produk Domestik Bruto", dikutip dari <http://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha-.html>, diakses pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 jam 10.30 WIB.

<sup>24</sup>*Ibid.*

Yang membedakannya adalah bahwa ekonomi Islam mengkaji perilaku individu lebih berdasarkan etika, nilai dan moral. Sehingga Manusia Rasional (*Ration Man*) Islam tidak sekedar memuaskan materi saja, tetapi juga harus memperhatikan kepuasan spiritualnya. Jadi, fungsi maslahat (*utility*) individu dalam Islam adalah  $U = u(M,S)$ . M merepresentasikan konsumsi semua barang-barang yang bersifat materil, sedangkan S adalah semua aktivitas yang bersifat spiritual. Pembahasan ini di antaranya berangkat dari firman Allah SWT surat Hud ayat 61<sup>25</sup>:

﴿وَالِى ثَمُوذَ أَخَاهِم صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرِهِ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ﴾

**Artinya:** “Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah): dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do’a hamba-Nya).” (Q.S. Huud: 61)<sup>26</sup>

Pada ayat di atas, kata yang paling penting untuk digaris bawah adalah “pemakmurnya”. Terminologi “pemakmuran bumi” ini mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana dikatakan Ali bin Abi Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir:

<sup>25</sup> Rizal Muttaqin, “Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam”, *Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, (November 2018), hlm. 119-1208.

<sup>26</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), hlm. 336.

*“Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran bumi dengan perhatian yang lebih besar dari pada orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran bumi. Barang siapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran bumi, negara tersebut akan hancur.”<sup>27</sup>*

Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta kesinambungan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata atau hasil dari kuantitas, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru memicu terjadinya keterbelakangan, kekacauan dan jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan ekonomi Islam.<sup>28</sup>

Dalam berbagai literatur tentang ekonomi Islam, pada dasarnya ekonomi Islam memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan *a sustained growth of a right kind of output which can contribute to human*

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Almizan, “Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Maqdlā: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2016), hlm. 207-208.

*welfare* (pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia).<sup>29</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia.<sup>30</sup>

Sedangkan istilah pembangunan ekonomi yang dimaksudkan dalam Islam adalah *the process of alleviating proverty and provision of ease, comfort and decency in life* (proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan susila dalam kehidupan).<sup>31</sup>

Dalam pengertian ini, maka pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara integral.<sup>32</sup>

Di bawah ini beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut Keynes seperti yang sudah disebutkan di atas, yaitu:

---

<sup>29</sup> Tiara Nur Fitria, "Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 03, (November 2016), hlm. 31.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

## a. Inflasi

### 1) Definisi Inflasi

Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu. Definisi lain inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain.<sup>33</sup>

Disimpulkan inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, dan akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang.<sup>34</sup>

Teori kuantitas merupakan teori yang paling tua dan teori yang mendekati inflasi dari segi permintaan. Kemudian teori ini dikembangkan oleh kelompok monetaris yang mengatakan bahwa

<sup>33</sup> Aziz Septiatin, dkk, "Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *I-Economic*, Vol. 2, No. 1, (Juli 2016), hlm. 52.

<sup>34</sup> Marina dan Amiruddin K, "Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Nilai Tukar Rupiah di Indonesia", *Ecces: Economics, Social, and Development studies*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2016), hlm. 7.

inflasi terjadi apabila terjadi kenaikan jumlah uang beredar. Meningkatnya jumlah uang beredar berarti meningkatkan saldo kas masyarakat sehingga menambah pengeluaran konsumsi masyarakat.<sup>35</sup>

Teori Keynes dan teori tekanan biaya (*cost push theory*) mengatakan bahwa inflasi terjadi karena suatu kelompok masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Sehingga proses inflasi merupakan proses tarik menarik antar golongan masyarakat untuk memperoleh bagian masyarakat yang lebih besar dari pada yang mampu disediakan oleh masyarakat, fenomena semacam ini mengakibatkan kenaikan biaya (*cost push*).<sup>36</sup>

Teori strukturalis atau teori inflasi jangka panjang menyoroti penyebab inflasi yang berasal dari kekacauan struktur ekonomi, khususnya kestabilan *suplay* bahan makanan dan ekspor. Karena sebab-sebab struktural, penambahan barang-barang produksi ini terlalu lambat dibandingkan pertumbuhan kebutuhannya sehingga kenaikan harga bahan makanan dan kelangkaan devisa. Akibat selanjutnya, kenaikan harga-harga pada barang lain sehingga terjadi inflasi yang berkepanjangan bila pembangunan sektor penghasil bahan pangan dan industri barang ekspor dibenahi atau ditambah.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*



Adapun tingkat inflasi akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Teori Keynes menjelaskan hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di mana keistimewaan teori ini adalah di dalam jangka pendek (*short-run*) kurva penawaran agregat (AS) adalah positif. Kurva AS positif adalah harga naik dan *output* juga naik. Selanjutnya hubungan yang secara hipotesisnya kepada hubungan jangka panjang (*long-run relationship*) antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di mana inflasi naik akan tetapi pertumbuhan ekonomi turun.<sup>38</sup>

Teori di atas didukung penelitian yang dilakukan oleh Herman Ardiansyah (2017), bahwa ditemukan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jika inflasi naik maka pertumbuhan ekonomi akan turun dan sebaliknya jika inflasi turun maka pertumbuhan ekonomi akan naik.

Prima Andia Daniel (2018) juga menjelaskan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi meskipun tidak signifikan. Hal ini disebabkan kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi masih cenderung fluktuasi dan belum stabil.

---

<sup>38</sup> Ismail Fahmi Lubis, hlm. 44.

## 2) Inflasi dalam Islam

Dalam sistem ekonomi Islam inflasi bukan merupakan suatu masalah utama ekonomi secara agregat, karena mata uangnya stabil dengan digunakannya mata uang dinar dan dirham. Penurunan nilai masih mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan, di antaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar, tetapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya.<sup>39</sup>

Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena:

- a) Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit perhitungan. Orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut. Inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya inflasi kembali, atau dengan kata lain '*self feeding inflation*';
- b) Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya *Marginal Propensity to Save*);

---

<sup>39</sup> Idris Parakkasi, "Inflasi dalam Perspektif Islam", *LAA MAISYIR*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2016), hlm. 45.

- c) Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan barang-barang mewah (naiknya *Marginal Propensity to Consume*);
- d) Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yang menumpukkan kekayaan (*hoarding*) seperti: tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi ke arah produktif seperti: pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya.<sup>40</sup>

Adapun Al-Maqrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat di seluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Menurutnya, inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen, karena sangat membutuhkannya mereka (konsumen) harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama.<sup>41</sup>

Al-Maqrizi mengungkapkan bahwa sejatinya inflasi tidak terjadi karena faktor alam saja melainkan karena faktor kesalahan

<sup>40</sup> Adiwarman A. Karim, 2014, *Ekonomi Makro Islam (Edisi 3)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 139.

<sup>41</sup> Fadilla, "Perbandingan Teori Inflasi dalam Perspektif Islam dan Konvensional", *Islamic Banking*, Vol. 2, No. 2, (Februari 2017), hlm. 2.

manusia. Sehingga berdasarkan faktor penyebabnya Al-Maqrizi menegaskan bahwa inflasi terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>42</sup>

a) Inflasi Alamiah (*Natural Inflation*)

Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini disebabkan oleh berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Menurut Al-Maqrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang tersebut mengalami peningkatan. Harga-harga membumbung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Hal ini berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa sekalipun suatu bencana telah berlalu, kenaikan harga-harga tetap berlangsung. Hal ini merupakan implikasi dari bencana alam sebelumnya yang mengakibatkan aktivitas ekonomi terutama di sektor produksi mengalami kemacetan. Ketika situasi lebih normal, persediaan barang-barang yang signifikan, seperti benih padi, tetap tidak

---

<sup>42</sup> Awaluddin, "Inflasi dalam Perspektif Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Al-Maqrizi), *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 16, No. 2, (Juli-Desember 2017), hlm. 19).

beranjak naik, bahkan tetap langka, sedangkan permintaan terhadapnya meningkat tajam. Akibatnya, harga barang-barang ini mengalami kenaikan yang kemudian diikuti oleh kenaikan harga berbagai jenis barang dan jasa lainnya, termasuk upah dan gaji para pekerja.

b) Inflasi Karena Kesalahan Manusia (*Human Error Inflation*)

Selain faktor alam, Al-Maqrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Ia telah mengidentifikasi tiga hal yang menyebabkan terjadinya inflasi:

i. Korupsi dan administrasi yang buruk (*Corruption and Bad Administration*)

Al-Maqrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintahan yang berdasarkan pemberian suap dan bukan karena kapabilitas, akan menempatkan orang-orang yang tidak memiliki kredibilitas pada jabatan penting dan terhormat baik di kalangan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Mereka rela menggadaikan seluruh harta miliknya sebagai kompensasi untuk meraih jabatan yang diinginkan serta kebutuhan sehari-hari sebagai pejabat. Akibatnya akan terjadi penurunan drastis terhadap penerimaan dan pendapatan negara.

ii. Pajak yang berlebihan (*Excessive Tax*)

Menurut Al-Maqrizi, akibat dominasi para pejabat yang bermental korup dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang sudah ada. Konsekuensinya biaya-biaya produk meningkat, dan akan berimplikasi pada kenaikan harga barang produksi.

iii. Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan (*Excessive Seignorage*)

Ketika terjadi defisit anggaran baik sebagai akibat dari kemacetan ekonomi, maupun perilaku buruk para pejabat yang menghabiskan uang negara, pemerintah melakukan pencetakan uang fulus secara besar-besaran. Akibatnya uang tidak lagi bernilai.

**b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**

1) Definisi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang

dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan Pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan.<sup>43</sup>

Pengertian lain bahwa pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat-provinsi-daerah).<sup>44</sup>

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adalah nilai seluruh jenis *output* Pemerintah dikurangi nilai *output* untuk pembentukan modal sendiri dikurangi nilai penjualan barang/jasa (baik yang harganya signifikan dan tidak signifikan secara ekonomi) ditambah nilai barang/jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk diberikan pada RT secara gratis yang tidak signifikan secara ekonomi (*social transfer in kind-purchased market production*).

---

<sup>43</sup> Sri Danawati, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali", *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 5, No. 7, (Tahun 2016), hlm. 2125.

<sup>44</sup> Cliff Laisina, dkk, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara Tahun 2002-2013", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 15, No. 4, (Tahun 2015), hlm. 196.

Sukirno (2009) menjelaskan, pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat *output*, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>45</sup>

Keynes juga mengungkapkan dalam teorinya bahwa pengeluaran pemerintah merupakan variabel eksogen dari perkembangan ekonomi, di mana hubungan kausalitas menurut Keynes bersifat pengeluaran pemerintah menyebabkan perkembangan ekonomi.<sup>46</sup>

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah merupakan salah satu variabel makro ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika pengeluaran konsumsi pemerintah bertambah maka berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontribusi

---

<sup>45</sup> Rahmita Handayani, "Analisis Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau", *Jom FEKON*, Vol. 2, No. 2, (Oktober 2015), hlm. 3.

<sup>46</sup> Akhmad Solikin, "Pengeluaran Pemerintah dan Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) di Negara sedang Berkembang: Tinjauan Sistematis", *Jurnal Info Artha*, Vol. 2, No. 1, (Tahun 2018), hlm. 66.



pengeluaran produktif akan mendorong pergerakan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Teori Peacock dan Wiseman menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan Pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Maka pengeluaran pemerintah yang diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan tidak langsung jika meningkat maka menyebabkan GNP (dalam penelitian ini adalah *output*) meningkat pula. Sehingga disimpulkan, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>47</sup>

Penelitian Merlin Anggraeni (2017) menunjukkan bahwa berdasarkan hasil estimasi, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian secara parsial dan simultan berpengaruh baik terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

---

<sup>47</sup> M. zahari MS, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi", *Ekonomis: Jurnal of Economics and Business*, Vol. 1, No. 1, (September 2017), hl. 187.

Lutfiana Fiqry Ichvani dan Hadi Susana (2019) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## 2) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dalam Islam

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah Islam memerlukan dana untuk berbagai jenis pembiayaan. Di dunia Islam, pemerintahan memerlukan dana untuk menggunakan APBN dalam rangka mengendalikan pengeluaran pemerintah yang sesuai dengan jumlah pendapatannya. Tujuan dari anggaran pemerintah adalah menopang tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Tujuan pokok dari setiap pemerintahan Islam adalah memaksimalkan kesejahteraan seluruh warga negara dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan. Lebih jauh lagi, dalam Islam yang dimaksud dengan kesejahteraan bukanlah semata-mata diperoleh dari kekayaan material, yang setiap tahun dapat diukur dengan statistik pendapatan nasional, tetapi termasuk juga kesejahteraan rohani di dunia dan akhirat.<sup>48</sup>

Menurut Mannan, prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan

---

<sup>48</sup> Lilik Rahmawati, "Kebijakan Fiskal dalam Islam", *Al-Qanun*, Vol. 11, No. 2, (Desember 2008), hlm. 444.

menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Mannan melanjutkan, dari semua kitab agama masa dahulu, al-Qur'an lah satu-satunya kitab yang meletakkan perintah yang tepat tentang kebijakan negara mengenai pengeluaran pendapatan. Dengan demikian, kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dapat dipengaruhi melalui insentif atau meniadakan insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah.<sup>49</sup>

Secara umum fungsi kebijakan fiskal adalah fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi perekonomian. Dalam hal alokasi, maka digunakan untuk apa sajakah sumber-sumber keuangan negaraa, sedangkan distribusi menyangkut bagaimana kebijakan negara mengelola pengeluarannya untuk menciptakan perekonomian yang stabil. Kebijakan fiskal dalam Sistem Ekonomi Kapitalis hanyalah merupakan suatu kebutuhan untuk pemulihan ekonomi (*economy recovery*) akibat krisis dan untuk menggenjot perekonomian.<sup>50</sup>

Pembelanjaan pemerintah dalam koridor negara Islam berpegang pada terpenuhinya pemuasan semua kebutuhan primer (*basic needs*) tiap-tiap individu dan kebutuhan sekunder dan tersier (*al-hajat al-kamaliyyah*)nya sesuai kadar kemampuannya sebagai

---

<sup>49</sup> Rasiyam, Kebijakan Fiskal dalam Islam (Solusi Bagi Ketimpangan dan Ketidakadilan Distribusi)", *Jurnal Khatulistiwa-Journal Of Islamic Studies*, Vol. 4, No. 1, (Maret 2014), hlm. 89.

<sup>50</sup> Lilik Rahmawati, hlm. 454.

individu yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, *concern* suatu negara Islam harus lebih difokuskan kepada pendistribusian ekonomi secara merata, dengan pendistribusian yang merata akan terjamin keadilan di tengah masyarakat, dan juga tidak akan ada jurang pemisah yang tajam antara si kaya dan miskin. Berdasar pada prinsip keadilan tersebut, akan terjamin kebutuhan primer secara menyeluruh bagi tiap individu rakyat, di samping masing-masing individu akan mampu memenuhi kebutuhan sekundernya dan tersiernya.<sup>51</sup>

Mengenai pengeluaran negara selama masa pemerintahan Rasulullah saw secara sistematis digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 453.

Tabel 2.2 Pengeluaran pada Pemerintahan Islam

Primer	Sekunder
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Biaya pertahanan seperti persenjataan, unta dan persediaan.</li> <li>➤ Penyaluran zakat dan <i>'ushur</i> kepada yang berhak menerimanya.</li> <li>➤ Pembayaran gaji untuk wali, <i>qady</i>, guru, imam, <i>muadzin</i>, dan pejabat negara.</li> <li>➤ Pembayaran upah para sukarelawan.</li> <li>➤ Pembayaran utang negara.</li> <li>➤ Bantuan untuk musafir (dari daerah fadak).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah.</li> <li>➤ Jamuan untuk delegasi keagamaan, utusan suku, dan negara serta biaya perjalanan.</li> <li>➤ Hadiah untuk pemerintah negara lain.</li> <li>➤ Pembebasan kaum muslimin yang menjadi budak.</li> <li>➤ Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan kaum muslimin.</li> <li>➤ Pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin.</li> <li>➤ Pembayaran tunjangan untuk orang miskin.</li> <li>➤ Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah.</li> <li>➤ Pengeluaran rumah tangga Rasulullah saw.</li> <li>➤ Persediaan darurat.</li> </ul>

Sumber: Lilik Rahmawati, 2008

### c. Hutang Luar Negeri

#### 1) Definisi Hutang Luar Negeri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang adalah uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sementara secara etimologi, utang atau *debt* (Inggris) berasal dari istilah Bahasa Perancis *dette* atau istilah Bahasa Latin *debitum* yang bermakna “yang berutang”. Istilah *debitur* konon pertama kali digunakan dalam bahasa Inggris pada awal abad ke-13. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mendefinisikan pinjaman sebagai utang yang dipinjamkan dari pihak lain dengan kewajiban membayar kembali. Sedangkan pinjaman luar negeri adalah sejumlah dana yang diperoleh dari negara lain (*bilateral*) atau (*multilateral*) yang tercermin dalam neraca pembayaran untuk kegiatan investasi, menutup *saving-investment gap* dan *foreign exchange gap* yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta.<sup>53</sup>

Menurut SKB Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas (No.185/KMK.03/1995 dan Nomor KEP.031/KET/5/1995), Pinjaman Luar Negeri adalah penerimaan negara baik dalam bentuk devisa, dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau

---

<sup>53</sup> Dedi Junaedi, “Hubungan Antara Utang Luar Negeri dengan Perekonomian dan Kemiskinan: Komparasi Antarezim Pemerintahan”, *Simposium Nasional Keuangan Negara*, (Tahun 2018), hlm. 565.

jasa yang diperoleh dari pemberian pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.<sup>54</sup>

Adapun dijelaskan *foreign aid* atau bantuan luar negeri adalah suatu bentuk transfer dana masyarakat internasional dalam bentuk pinjaman (*loans*) dan hibah (*grants*) baik secara langsung dari suatu negara ke negara lainnya (*bilateral assistance*) atau secara tidak langsung melalui lembaga-lembaga bantuan *multilateral* atau (*multilateral assistance*).<sup>55</sup>

Dilihat dari jangka waktunya, hutang luar negeri dapat dibagi menjadi: (1) hutang jangka pendek, (2) hutang jangka menengah, dan (3) hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek adalah hutang dengan jangka waktu jatuh tempo (*maturity*) satu tahun. Hutang jangka menengah merupakan hutang dengan jangka waktu jatuh tempo 5-15 tahun. Sedangkan, hutang jangka panjang adalah hutang yang jangka waktu jatuh tempo lebih dari 15 tahun.<sup>56</sup>

Hutang merupakan bagian dari kebijakan fiskal (APBN) yang menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan ekonomi secara keseluruhan. Hutang terutama merupakan konsekwensi dari postur

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Syaparuddin, dkk, "Pengaruh Hutang Luar Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Thailand, Malaysia, Philipina, Vietnam dan Burma Periode 1990-2013, *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol. 10, No. 01, (April 2015), hlm. 208.

<sup>56</sup> *Ibid*, 208-209.

APBN (yang mengalami defisit), di mana pendapatan negara lebih kecil dari pada belanja negara. Tujuan pengelolaan ekonomi adalah:

a) Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk:

- i. Penciptaan kesempatan kerja;
- ii. Penurunan angka kemiskinan;
- iii. Penguatan pertumbuhan ekonomi.

b) Menciptakan keamanan

Dedi Junaedi (2018) menegaskan, hutang luar negeri merupakan sumber pembiayaan anggaran pemerintah dan pembangunan ekonomi. Hutang luar negeri dimanfaatkan untuk membiayai belanja negara sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi, terutama kegiatan-kegiatan produktif sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di mana dalam penelitiannya ditemukan bahwa hutang luar negeri berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Teori di atas juga dibuktikan dalam penelitian Syaparuddin, dkk, (2015), yaitu ditemukan adanya hubungan yang positif antara hutang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Philipina dan Myanmar, sementara di negara Indonesia, Malaysia, dan Vietnam hutang luar negeri mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.



## 2) Hutang Luar Negeri dalam Islam

Hutang dalam bahasa Arab adalah *ad Dayn* yaitu sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. *Dayn* disebut juga dengan *wasfu al-dzimmah* (sesuatu yang mesti dilunasi atau diselesaikan) sehingga hutang negara adalah milik rakyat dan digunakan untuk keperluan rakyat. Selain itu, *ad Dayn* secara bahasa juga dapat bermakna pinjaman.<sup>57</sup>

Secara umum terdapat dua pandangan terkait hutang negara dalam perspektif ekonomi Islam.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Faisol Luthfi, "Hutang Luar Negeri Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam", *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, (Tahun 2018), hlm. 168.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 170.

**Tabel 2.3 Pandangan Islam Terhadap Hutang Luar Negeri**

<b>Pro Hutang (<i>External Financing</i>)</b>	<b>Kontra Hutang (<i>External Financing</i>)</b>
Boleh sepanjang bentuk dan mekanisme sesuai dengan syariat.	Tidak boleh menutup <i>budget deficit</i> dengan hutang luar negeri.
Latar belakang: Konsep dan fakta historis bahwa kerjasama dengan pihak lain dalam satu usaha diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Bentuk kerjasama dalam Islam seperti <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> dapat dikembangkan sebagai <i>external financing</i> dan juga bentuk-bentuk ini lebih ke arah <i>creating equity</i> .	Latar belakang: Tendensinya ke arah faktual dan preventif, di mana keterlibatan negara-negara Islam dalam hutang luar negeri pasti akan bersentuhan dengan riba.

**Sumber:** Faishol Luthfi, 2018

Kelompok pertama berpendapat bahwa negara Islam tidak seharusnya melakukan pembiayaan defisit (pengeluaran lebih besar dari pendapatan), karena hal itu pada akhirnya dapat menyebabkan pemerintah berutang dengan konsekuensi membayar bunga, dan

mendekati riba. Pengeluaran yang bertambah ini juga dapat menyebabkan pemborosan.<sup>59</sup>

Namun kelompok ekonom muslim kedua berpendapat sudah tidak waktunya lagi negara-negara Islam mempertahankan konsep anggaran berimbang yang berkonsekuensi lambatnya pertumbuhan ekonomi dan tidak tergalinya sumber daya alam karena ketiadaan modal. Negara-negara Islam yang kaya sumber daya alam, namun kurang modal untuk mengolah harus mau menerima anggaran defisit dengan solusi meminjam modal ke negara lain untuk digunakan sebagai modal penggalian sumber daya alam seperti minyak, gas dan lain-lain, atau dengan memungut pajak.<sup>60</sup>

Berikut ini dikemukakan pendapat tiga ekonom Islam modern yang sama-sama setuju dengan konsep anggaran defisit:<sup>61</sup>

- a) Menurut Mannan, sebuah negara Islam modern harus menerima konsep anggaran modern (sistem anggaran defisit) dengan perbedaan pokok dalam hal penggunaan defisit (kekurangan) anggaran. Negara Islam dewasa ini harus mulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlukan (sesuai yang direncanakan APBN) serta mencari jalan dan cara baru untuk mencapainya, baik

---

<sup>59</sup> Muhajirin, “Konsep Hutang Negara dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Analisis Antara Konsep Anggaran Balance Budget dengan Defisit Budget)”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 6, (Tahun 2015), hlm. 349.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 349-350.

<sup>61</sup> Muhajirin, hlm. 349.

dengan merasionalisasi struktur pajak atau dengan mengambil kredit (utang) dari sistem perbankan dalam negeri atau dari luar negeri (Bank Dunia, IMF, ABD dan lain-lain).

Pemilihan anggaran defisit ini tentunya akan memerlukan tambahan dengan cara meminjam. Untuk itu terdapat tiga sumber pinjaman tradisional bagi kebanyakan negara Islam, yaitu: Bank Sentral, Bank Umum, dan masyarakat (obligasi). Namun utang harus dibuat tanpa adanya tekanan dari pihak pemberi utang (kreditur), yang akan mengakibatkan hilangnya kebebasan, kehormatan, dan kedaulatan negara Muslim. Kemudian yang tak kalah penting adalah utang itu harus tanpa bunga (riba), yang akan memberatkan pihak yang berhutang (*debitur*).

- b) Muhammad Umer Chapra setuju dengan anggaran pembelanjaan defisit, namun dengan solusi yang berbeda dengan Mannan. Umer Chapra berpendapat bahwa negara-negara Muslim harus menutup defisit anggaran dengan pajak, yaitu mereformasi dengan sistem perpajakan dan program pengeluaran negara, bukan dengan jalan pintas melalui ekspansi moneter dan meminjam.

Chapra lebih setuju dengan meningkatkan pajak, karena meminjam akan membawa kepada riba, di mana peminjaman itu juga meniadakan keharusan berkorban, namun hanya menangguhkan

beban sementara waktu dan akan membebani generasi yang akan datang dengan beban berat yang semestinya tidak mereka pikul.

- c) Abdul Qadim Zallum setuju dengan anggaran defisit, dengan solusi yang hamper sama dengan Umer Chapra, yaitu defisit diatasi dengan penguasaan BUMN dan pajak. Beliau mengatakan anggaran negara pada saat ini sangat berat dan besar, setelah meluasnya tanggungjawab dan bertambahnya pos-pos yang harus disubsidi. Pendapatan *baitul maal* dari sumber-sumber tradisional seperti: *Ghanimah, Fa'i, Jizyah, Kharaj, 'Ushur*, dan *Khumus* kadang kala tidak memadai untuk memenuhi pengeluaran negara yang semakin berkembang. Oleh karena itu, negara harus mengupayakan cara lain yang mampu menutupi *baitul maal* kas negara, baik dalam kondisi ada harta maupun tidak. Kewajiban tersebut berpindah kepada kaum muslimin pada saat *baitul maal* kosong.

Adapun di dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa yang mengalami kesulitan atau kesukaran dalam mengembalikan hutang, maka dianjurkan untuk memberikan tempo atau waktu sampai orang tersebut bisa melunasinya. Dianalogikan orang yang terdapat dalam surat ini adalah pemerintah. Pemerintah yang belum mampu melunasi hutang luar negeri yang sampai saat sekarang ini masih melilit Indonesia.

Untuk menghindari dampak negatif dari utang luar negeri yang mengandung unsur riba, maka solusi agar terlepas dari jeratan hutang luar negeri yang terdiri dari:<sup>62</sup>

a) Konsep *Musyarakah (Syirkah)*

Adalah percampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan. Jadi pemerintah Indonesia berbagi modal dengan Bank Islam dalam sebuah *asset rill* dan keuntungan yang akan dihasilkan darinya. Maka dengan adanya konsep Musyarakah ini, akan tercipta kerjasama yang adil. Jika terjadi kerugian dalam kegiatan proyek atau program maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama. Sebaliknya, jika terdapat keuntungan dalam transaksi, maka keuntungan tersebut dibagi bersama.

b) Konsep Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Indonesia mengajukan proposal untuk mengajukan kegiatan proyek kepada Bank Islam atau sejenisnya dengan pola bagi hasil. Dalam hal ini bank akan memberikan modal 100% untuk dikelola oleh mitra kerjanya (Indonesia), dengan perjanjian bahwa jika proyek tersebut menghasilkan keuntungan akan dibagikan menurut porsi yang ditentukan (*nisbah*) misal: 67% untuk pemilik modal dan 33% untuk Indonesia.

---

<sup>62</sup> Winda Afriyenis, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)*, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2016), hlm. 11.

c) Konsep Jual-Beli (*Murabahah*)

Perdagangan yang dilakukan dalam ekonomi Islam dapat digunakan untuk meraih keuntungan tanpa harus menimbulkan kezhaliman dan eksploitasi terhadap pihak yang terkait. Solusi di atas dijelaskan agar pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan negara lain dengan menggunakan sistem *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* dalam menciptakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak harus melakukan kerjasama dengan berutang kepada negara lain, karena ketiga solusi di atas adalah cara yang efektif untuk meningkatkan pembangunan ekonomi tanpa adanya riba.

## 2. Pembiayaan Syariah

### a. Definisi Pembiayaan Syariah

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Rahma Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, (Februari 2015), hlm. 186.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek yaitu Aspek Syar'i dan Aspek Ekonomi. Aspek Syar'i berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur *maisyir*, *gharar* dan *riba* serta bidang usahanya harus halal). Sedangkan Aspek Ekonomi, di samping mempertimbangkan hal-hal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.<sup>64</sup>

Lazimnya dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah* dan prinsip *musyarakah*.
- 2) Pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip *murabahah*, prinsip *istishna'* dan prinsip *salam*.
- 3) Pembiayaan sewa-menyewa berdasarkan prinsip *ijarah* (sewa murni) dan *ijarah al-muntahiya bit-tamlik* (sewa beli atau sewa dengan hak opsi).<sup>65</sup>

Ketiga sistem pembiayaan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> Widia Astuty, "Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara", *the 8<sup>th</sup> International Workshop on Islamic Decelopment*, (Juni 2015), hlm. 4-5.

<sup>65</sup> Rahmat Ilyas, hlm. 190.



## 1) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Mudharabah*

### a) Definisi

Akad *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

### b) Akad

- i. *Mudharabah Muthlaqah*. *Mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
- ii. *Mudharabah Muqayyadah*. *Mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

### c) Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup>Muhamad, *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum, Teori, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 182-183.

## 2) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Musyarakah*

### a) Definisi

Akad *Musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

### b) Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *Musyarakah*.<sup>67</sup>

## 3) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Murabahah*

### a) Definisi

Akad *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

### b) Fatwa Syariah

i. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 184-185.

- ii. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.
- iii. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah*.
- iv. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.16/DSN-MUI/IX/2000 Diskon dalam *Murabahah*.
- v. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*.
- vi. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah (Khasmi Fi Al-Murabahah)*.
- vii. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Nasabah Tidak Mampu Membayar.
- viii. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.
- ix. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 185-186.

#### 4) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Salam*

##### a) Definisi

Akad *Salam* adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

##### b) Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*.<sup>69</sup>

#### 5) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Istishna'*

##### a) Definisi

Akad *Istishna'* adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

##### b) Fatwa Syariah

i. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*.

ii. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna'* Paralel.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 187.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 188.

## 6) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Ijarah*

### a) Definisi

*Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

*Ijarah Muntahiya Bit-tamlik* adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan perpindahan hak milik objek sewa.

### b) Fatwa Syariah

- i. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- ii. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah al Muntahiyah bi al-Tamlik*.<sup>71</sup>

## b. Peran Pembiayaan Syariah Bagi Pertumbuhan Ekonomi

Sektor keuangan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan berbagai sektor ekonomi. Ini dikarenakan lembaga perbankan mampu memobilisasi surplus modal dari pihak ketiga untuk diinvestasikan ke berbagai sektor ekonomi yang membutuhkan

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 188-189.

pembiayaan. Ketika sektor keuangan bertumbuh secara baik maka akan semakin banyak sumber pembiayaan yang dapat dialokasikan ke sektor-sektor produktif dan akan semakin bertambah pembangunan fisik modal yang bisa diciptakan, di mana nantinya akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dan kinerja positif sektor keuangan akan berkorelasi positif terhadap kinerja ekonomi suatu daerah. Sektor keuangan bisa menjadi sumber utama pertumbuhan sektor *rill* ekonomi. Semakin banyak alokasi dana pihak ketiga perbankan yang dialokasikan pada sektor *rill* maka akan semakin berkurang tingkat pengangguran dan kemiskinan dalam sebuah perekonomian.<sup>72</sup>

Salah satu ciri utama perbankan syariah yang berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor *rill* dan ekonomi adalah lembaga keuangan syariah lebih menekankan pada peningkatan produktivitas. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menekankan konsep *asset & production based system* (sistem berbasis aset dan produksi) sebagai ide utamanya.<sup>73</sup>

Melalui pola pembiayaan seperti itu maka sektor *rill* dan sektor keuangan akan bergerak secara seimbang. Akibatnya semakin tumbuh perbankan syariah maka akan semakin besar kontribusinya terhadap kinerja dan pertumbuhan ekonomi. Jumlah kemiskinan dan pengangguran

---

<sup>72</sup> Sri Deti, dkk, "Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sambas", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 05 No. 2, (Agustus 2017), hlm. 61-62.

<sup>73</sup> Ibid, hlm. 62.

secara langsung akan teratasi melalui kinerja ekonomi yang baik. Dengan demikian, berinvestasi pada perbankan syariah tidak hanya memberikan keuntungan pada orang yang memiliki kelebihan dana namun juga menguntungkan pihak-pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan syariah.<sup>74</sup> Jauh lebih penting keuntungan terbesar yang dapat diperoleh oleh seseorang ketika berinvestasi pada perbankan syariah yaitu sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261 berikut ini:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ  
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ  
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ

**Artinya:** “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir; seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>75</sup> (Q.S. Al-Baqarah: 261)

Muhammad Abduh dan Mohd Azmi Omar menemukan bukti bahwa dalam waktu jangka panjang, pengembangan keuangan Islam memiliki peran positif dan penting serta berhubung dengan pertumbuhan ekonomi dan penambahan modal. Pembiayaan dalam negeri yang

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 62.

<sup>75</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), hlm. 65.

diberikan sektor perbankan syariah telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan kata lain, perbankan Islam telah terbukti efektif sebagai perantara keuangan yang memfasilitasi peralihan dana dari “rumah tangga surplus untuk rumah tangga defisit”. Hubungan antara pembiayaan syariah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia berperan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia.<sup>76</sup>

Ade Ananto dan Ali Rama (2017) menyampaikan dalam system keuangan Islam, penelitian empiris sejauh ini yang telah dilakukan untuk menganalisis tingkat efisiensi, superioritas dan stabilitas bank-bank Islam dibandingkan bank-bank konvensional untuk mencapai target fungsi intermediasi moneter yang difokuskan pada pencapaian keseimbangan pertumbuhan *rill* ekonomi, penurunan inflasi dan pengangguran. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem keuangan yang tidak menggunakan bunga (*interest-free banking system*) adalah lebih unggul dalam mencapai target moneter.

Dalam kasus Prastowo (2018) mengamati ada hubungan positif antara pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila pembiayaan syariah meningkat maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

---

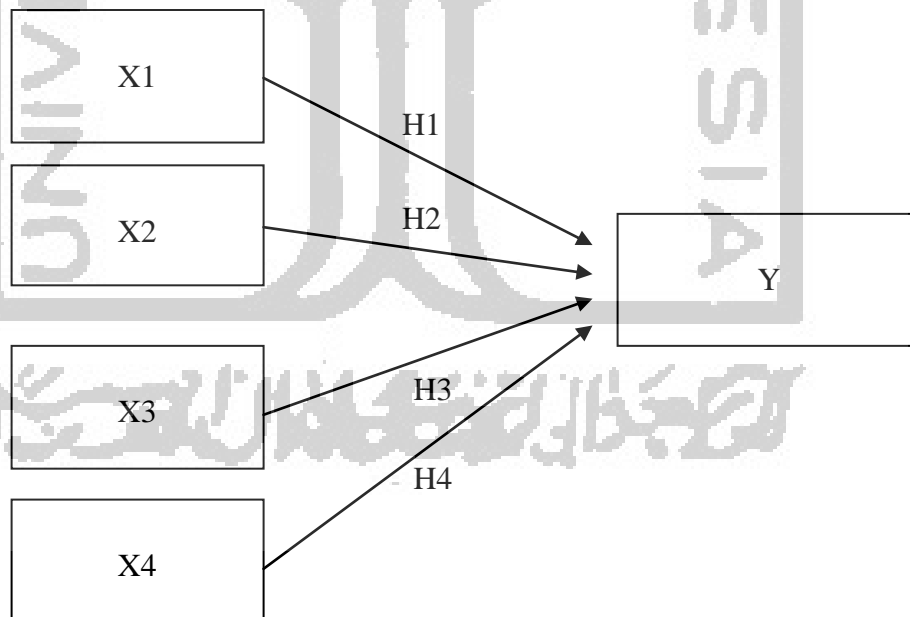
<sup>76</sup>Safaah Restuning Hayati, “Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, *INDO-ISLAMIKA*, Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni 2014), hlm. 43.



Widia Astuty (2015) juga melakukan studi kasus di Sumatera Utara dan menemukan bahwa pembiayaan syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

### C. Kerangka Berfikir

Pada pembahasan ini peneliti akan memaparkan model/kerangka berpikir penelitian yang menjadi dasar sekaligus alur berfikir dalam melihat pengaruh variabel yang menentukan Pertumbuhan Ekonomi. Selanjutnya informasi mengenai kerangka berpikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran**

Keterangan:

Y : Pertumbuhan Ekonomi

X1 : Inflasi

X2 : Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

X3 : Hutang Luar Negeri

X4 : Pembiayaan Syariah

H1, H2, H3, H4 : Hipotesis 1, 2, 3, 4

Dari gambar 2.1 di atas, peneliti ingin mengkaji dan menguji apakah variabel Inflasi, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Hutang Luar Negeri, dan Pembiayaan Syariah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Untuk mengujinya penelitian ini menggunakan analisis *Error Correction Model* (ECM).

#### D. Hipotesis Penelitian

Beberapa teori yang telah diuraikan di atas didukung oleh beberapa penelitian yang peneliti anggap relevan dalam mendukung penelitian ini, yaitu di antaranya penelitian oleh Herman Ardiansyah (2017) dengan judul “**Analisis Hubungan Antara Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**”,

menjelaskan bahwa inflasi dalam jangka pendek dan jangka panjang berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jika inflasi naik maka pertumbuhan ekonomi akan turun dan sebaliknya jika inflasi turun maka pertumbuhan ekonomi akan naik.

Prima Audia Daniel (2018) juga dalam penelitiannya yang berjudul **“Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi”**, menjelaskan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi meskipun tidak signifikan. Hal ini disebabkan kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi masih cenderung fluktuasi dan belum stabil.

Irene Sarah Larasati dan Sri Sulasmiyati (2018) telah melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Inflasi, Ekspor dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Studi Kasus Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand)”**, dan menemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Nurhidayati (2015) dengan judul penelitian **“Analisis Pengaruh Belanja Pembangunan/Modal dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak di Indonesia”**, menjelaskan tingkat inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila terjadi peningkatan yang signifikan dari inflasi maka akan menyebabkan krisis ekonomi yang akan berdampak pada penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya oleh Jul Fahmi Salim berjudul **“Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”**, diperoleh hasil inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya semakin tinggi tingkat inflasi maka pertumbuhan ekonomi akan menurun secara signifikan.

Andrik Mukamad Rofii dan Putu Sarda Ardyan (2017) melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur”**, di mana memperoleh hasil bahwa variabel inflasi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.<sup>77</sup>

Berdasarkan beberapa teori dan penelitian terdahulu di atas, maka hipotesis satu dalam penelitian ini adalah:

**H1 : Inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.**

Dalam penelitian M. Zahari MS (2017) berjudul **“ Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi”**, mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.

Begitu juga dengan Merlin Anggraeni (2017) dalam penelitiannya yang berjudul **“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan,**

---

<sup>77</sup> Andrik Mukamad Rofii dan Putu Sarda Ardyan, “Analisis Pengaruh Inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur”, *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2017), hlm. 303-316.

**Kesehatan dan Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia periode 1970-2015**”, mengungkapkan adanya pengaruh positif dan signifikan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek ECT pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian secara parsial dan simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Lutfiana Fiqry Ichvani dan Hadi Susana (2019) dengan judul penelitian **“Pengaruh Korupsi, Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN 5”**, menyatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN.

Dalam kasus Agus Junaidi (2016) mengamati dalam penelitiannya yang berjudul **“Analisis Trade-Off Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur”**, bahwa ada hubungan positif antara pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Sehingga pengeluaran Pemerintah perlu ditingkatkan terutama pada bidang infrastruktur, transportasi, informasi dan telekomunikasi, energi, subsidi, dan bantuan pada sektor-sektor produktif.

Penelitian yang dilakukan oleh James N. Maingi (2017) berjudul **“The Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Kenya: 1963-2008”**, juga menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah untuk investasi, infrastruktur fisik, pendidikan, perawatan kesehatan, pembayaran hutang publik, urusan ekonomi, administrasi umum dan jasa, pertahanan, ketertiban umum dan

keamanan nasional, dan konsumsi pemerintah berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Kenya.

Mahmoud Ahmad Abdullah dan Rusdarti (2017) melakukan analisis penelitian yang berjudul **“The Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Indonesia, Malaysia and Singapore”**, menemukan fakta bahwa pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, Malaysia, dan Singapura.<sup>78</sup>

Rosdiana Sijabat (2017) melakukan penelitian dengan judul **“Do Productive Government Expenditures Affect Economic Growth? Evidence From Provincial Governments Across Indonesia”** dan menemukan bahwa berbagai jenis pengeluaran pemerintah dalam bidang produktif menyebabkan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan beberapa teori dan penelitian terdahulu di atas, maka hipotesis dua dalam penelitian ini adalah:

**H2 : Pengeluaran Konsumsi Pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.**

Studi lain yang dilakukan oleh Syaparuddin, dkk (2015) menyelidiki kasus hutang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara Indonesia, Thailand, Malaysia, Philipina, Vietnam, dan Burma, di mana judul penelitian

---

<sup>78</sup> Mahmoud Ahmed Abdullah dan Rusdarti, “The Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Indonesia, Malaysia and Singapura”, *Journal of Economic Education*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2017), hlm. 11-18.

Syaparuddin, dkk (2015) **“Pengaruh Hutang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Burma Periode 1990-2013”** dengan menggunakan metode regresi data panel, hasilnya menunjukkan peningkatan hutang luar negeri berakibat pada perlambatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi selama periode 1990-2013 terjadi Indonesia, Malaysia, dan Vietnam serta Thailand. Sedangkan yang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi terjadi di Filipina dan Myanmar.

Dedi Junaedi (2018) lebih lanjut dalam penelitiannya yang berjudul **“Hubungan Antara Utang Luar Negeri dengan Perekonomian dan Kemiskinan: Komparasi Antarezim Pemerintahan”**, yaitu mengatakan utang luar negeri memiliki korelasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Muhammad Dandy Kartarineka Putra dan Sri Sulasmiyati (2018) melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Studi pada Bank Indonesia Periode Kuartal IV 2008-2017)”**, yaitu bahwa variabel utang luar negeri sebagai variabel independen berpengaruh signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Muflihul Khair dan Bahrul Ulum Rusydi (2016) melakukan studi kasus di Indonesia yang diberi judul **“Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri (*Foreign Debt*) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia”**, dan mendapatkan hasil bahwa utang luar negeri

memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.<sup>79</sup>

Abdul Malik dan Denny Kurnia (2017) meneliti dengan judul **“Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”**, maka diperoleh hasil bahwa utang luar negeri berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian lain oleh Bagus Aditya Rahman, dkk (2017) dengan garis besar judul penelitian **“Pengaruh Utang Luar Negeri dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Produk Domestik Bruto Indonesia Periode 2005-2014)”**, memberikan hasil bahwa nilai utang luar negeri pemerintah Indonesia berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>80</sup>

Berdasarkan beberapa teori dan penelitian terdahulu di atas, maka hipotesis tiga dalam penelitian ini adalah:

**H3 : Hutang Luar Negeri memiliki pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.**

Ade Ananto Terminanto dan Ali Rama (2017) dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Belanja Pemerintah dan Pembiayaan Bank Syariah**

---

<sup>79</sup> Muflihul Khair dan Bahrul Ulum Rusydi, Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri (Foreign Debt) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia”, *Ecces: Economics, Social, and Development Studies*, Vol. 3, No. 1, (juni 2016), hlm. 1-21.

<sup>80</sup> Bagus Aditya Rahman, dkk, Pengaruh Utang Luar Negeri dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Produk Domestik Bruto Indonesia Periode 2005-2014), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 45, No. 1, (April 2017), hlm. 55-62.



**Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Data Panel Provinsi di Indonesia”** dan menemukan bahwa pembiayaan pada bank syariah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Widia Astuty (2015) mengamati pembiayaan bank syariah di Sumatera Utara, dengan memberikan pada judul penelitiannya **“Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara”**, mendapatkan hasil bahwa pembiayaan syariah mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Prastowo (2018) dengan judul penelitian **“Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Empiris di 13 Negara”**, mengulas menggunakan regresi panel dinamis dengan metode *Generalized Method of Moments* (GMM) menyimpulkan bahwa variabel pembiayaan syariah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Salah satu penelitian oleh Jamel Boukhatem dan Fatma Ben Moussa (2018) berjudul **”The Effect of Islamic Banks on GDP Growth: Some Evidence From Selected MENA Countries”**, yang secara empiris untuk menilai pengaruh pinjaman perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi 13 negara di kawasan Mena selama periode 2000-2014 dan ditemukan hasil bahwa pemberian pinjaman oleh perbankan syariah merangsang peningkatan pada pertumbuhan ekonomi di negara-negara MENA.

M. Putra Rizki dan Fakhruddin (2015) juga mempertegas dalam penelitiannya yang berjudul **“Intermediasi Perbankan Syariah Terhadap**

**Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”**, mengatakan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah berpengaruh terhadap kesemua variabel dalam penelitian, yaitu SBIS, pertumbuhan, aktivitas perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.<sup>81</sup>

Berdasarkan beberapa teori dan penelitian terdahulu di atas, maka hipotesis empat dalam penelitian ini adalah:

**H4 : Pembiayaan Syariah memiliki pengaruh positif terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi.**

---

<sup>81</sup> M. Putra Rizki dan Fakhruddin, “Intermediasi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 1, (Mei 2015), hlm. 42-55.